

## Kebijakan Luar Negeri Turki Melawan *Partiya Yekitiya Demokrat* di Suriah Utara (2016-2019)

Rifqy Alief Abiyya, Rizky Hikmawan

Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta  
e-mail : aliefabiyya@gmail.com

### Abstract

*This research explores Turkey's strategic response to Kurdish armed groups, specifically the Partiya Yekitiya Demokrat (PYD) and its military faction, the Yekineyen Parastina Gel (YPG), operating near the Turkish-Syrian border. The Turkish government regards the PYD/YPG as the Syrian branch of the Partiya Karkeren Kurdistan (PKK), a Kurdish separatist group in domestic insurgency. The conflict between Turkey and the Kurds has persisted for decades, with peace initiatives yet to materialize. Turkey is worried about the PYD/YPG's growing power in northern Syria, especially near the border with Turkey, because it could lead to expansion that threatens Turkish sovereignty and national security. In response, Turkey has launched a series of cross-border military operations to counter this expansion, such as Operation Euphrates Shield (2016), Operation Olive Branch (2017), and Operation Peace Spring (2019). This study uses the offensive neorealism theory to explain that Turkey's military actions are not only defensive but also strategic moves to establish regional dominance in the Middle East. This research adopts a qualitative descriptive methodology, aiming to describe and analyze PYD/YPG as a threat to Turkey and the Turkish government's policy response through military operations to protect its sovereignty and national security. Data collection techniques involve document analysis of prior studies and interviews with selected experts. The findings indicate that Turkey's military operations are primarily driven by national security threats, particularly due to PYD/YPG's collaboration with the PKK and their repeated attacks on Turkish territory. In practice, the policy has succeeded in limiting the PYD/YPG's territorial expansion, especially in autonomous Kurdish zones in northern Syria. Nevertheless, it has not fully resolved the root causes of the conflict between Turkey and Kurdish forces.*

**Keywords:** *cross-border military operations, Kurdish armed groups, PKK, PYD/YPG, Turkey*

## Abstrak

Penelitian ini membahas kebijakan Turki dalam menghadapi milisi Kurdi yaitu *Partiya Yekitiya Demokrat* (PYD) dan sayap militernya *Yekineyen Parastina Gel* (YPG) di perbatasan Turki dan Suriah. Turki juga menganggap PYD/YPG merupakan perpanjangan tangan dari *Partiya Karkeren Kurdistan* (PKK), milisi Kurdi di wilayah Turki. Dominasi PYD/YPG di Suriah utara khususnya di perbatasan Turki bisa mengkhawatirkan karena berpotensi melakukan ekspansi lebih luas hingga mengancam kedaulatan dan keamanan Turki. Dalam menghadapi kondisi ini, Turki melakukan operasi militer lintas batas untuk menghadapi upaya ekspansi melalui *Operasi Euphrates Shield* (2016), *Operasi Olive Branch* (2017), dan *Operasi Peace Spring* (2019). Penelitian ini menggunakan pendekatan teori Neorealisme Ofensif John Mearsheimer yang menjelaskan bahwa serangan Turki adalah tindakan untuk pertahanan diri. Namun, bukan hanya pertahanan saja, pendekatan ini juga menjelaskan langkah untuk melakukan dominasi di kawasan. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan menjelaskan PYD/YPG sebagai ancaman bagi Turki dan upaya yang dilakukan Turki melalui kebijakan operasi militer untuk menghadapi ekspansi PYD/YPG. Sementara itu, teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan dokumentasi berdasarkan data atau penelitian terdahulu dan wawancara terhadap beberapa narasumber. Hasil penelitian menemukan bahwa kebijakan operasi militer ini karena adanya ancaman bagi keamanan nasional Turki. PYD/YPG juga beberapa kali melakukan serangan ke wilayah Turki, bekerjasama dengan PKK. Melalui kebijakan ini, Turki dapat menghambat upaya ekspansi yang ingin dilakukan PYD/YPG. Akan tetapi, secara garis besar belum bisa menyelesaikan secara penuh masalah antara Turki dan pasukan Kurdi.

**Kata kunci:** kelompok bersenjata Kurdi, operasi militer lintas batas, PKK, PYD/YPG, Turki

## Pendahuluan

Bangsa Kurdi adalah satu kelompok yang menempati wilayah Kekhalifahan Ottoman seperti di Anatolia Timur, Irak, hingga sebagian Suriah. Kalahnya Ottoman saat perang dunia pertama, membuat aliansi Inggris, Perancis, dan Italia membentuk sebuah

pakta “Treaty of Serves”. Pakta ini membahas tentang mengakhiri perang dan mengatur pembagian wilayah (Heriono, 2024). Perjanjian ini membuat Ottoman pecah ke beberapa negara, serta membuat etnis Kurdi terpisah ke berbagai negara. Orang-orang Kurdi terpecah ke empat negara, yaitu: Turki, Iran, Irak, dan Suriah. Di Turki, populasi Kurdi cukup besar, mencapai 10-15 juta jiwa. Sementara di Irak, etnis Kurdi menyentuh hingga 6 juta jiwa. Lalu di Iran ada sekitar 7 juta jiwa. Sedangkan di Suriah, sekitar 2-3 juta jiwa.

Dalam dinamika pemerintahan Turki, Kurdi bukanlah entitas baru. Pada awal abad 19 Ottoman runtuh, sehingga menghasilkan perubahan Turki yang signifikan menjadi Republik Turki yang dipimpin oleh Mustafa Kemal Ataturk. Sebenarnya, terdapat Perjanjian Serves yang menjadi salah satu upaya memberikan kemerdekaan etnis Kurdi. Pada tahun 1970-an, etnis Kurdi di Irak mencapai kesepakatan otonomi dengan pemerintah Irak. Kelompok Kurdi ini dipimpin oleh Masoud Barzani. Kesepakatan ini membuat jiwa nasionalisme etnis Kurdi meningkat di kawasan tersebut. Hal ini juga membuat pemerintah Turki semakin represif menekan etnis Kurdi yang berada di Turki. Di Turki, PKK (*Partiya Karkeren Kurdistan*) atau dalam literatur Barat sering disebut “Kurdistan Workers' Party” menjadi aktor dari upaya pendirian negara Kurdi di wilayah tersebut. PKK memperluas jaringannya ke Suriah dengan membentuk PYD (*Partiya Yekitia Demokrat*) atau *Democratic Union Party*, serta sayap militernya yaitu YPG (*Yekineyen Paranista Gel*) atau *People's Protection Units*. Jaringan ini, sering kali melancarkan serangan terhadap Turki sehingga menjadi ancaman bagi kedaulatan Turki khususnya di wilayah perbatasan Suriah yang banyak menjadi base camp dari militan tersebut (Kartanapura & Situmorang, 2022).

Konflik Turki dan Kurdi sebenarnya sudah membuat Turki kesulitan dalam mengatasinya. Salah satu upaya Turki mengatasi konflik dengan Kurdi yaitu munculnya Partai AKP (*Adalet ve Kalkinma Partisi*) atau *Justice and Development Party* pada tahun 2002. Partai ini membawa pembaharuan dalam politik Islam di Turki dengan salah satu tujuan untuk mengatasi konflik etnis yang sudah terjadi puluhan tahun sebelumnya. AKP membawa kebijakan khusus dalam mengatasi konflik dengan Kurdi yakni “Kurdish Opening”. Kebijakan ini memang lebih tertuju kepada penyelesaian dengan PKK, namun pada akhirnya belum terealisasikan. Berbagai gerakan Kurdi di negara di Turki, Irak, Iran, dan Suriah banyak menuntut untuk memiliki otoritas sendiri. Di Turki, PKK menjadi aktor dari upaya pendirian negara Kurdi di wilayah tersebut.

Pada tahun 2007, Turki dan Amerika Serikat sepakat bekerjasama melawan PKK, dengan alasan bahwa PKK dalam pandangan kedua negara itu adalah organisasi teroris. Namun, pasca meletusnya perang di Suriah yang bertujuan menggulingkan Bashar Assad, AS dinilai tidak konsisten oleh Turki karena mendukung YPG untuk melawan ISIS.

Hal ini karena Turki tetap menganggap YPG/PYD dan PKK sama saja, sebagai organisasi teroris yang mengancam kedaulatan Turki khususnya di perbatasan (Asyrofi, 2019).

Menurut perspektif pemerintah Turki, hubungan antara (PKK) dan (PYD) telah terjalin sejak lama. Pada masa pemerintahan keluarga Assad, Suriah dituding memberikan ruang bagi PKK untuk merekrut anggota di wilayah utara Suriah. Turki juga beranggapan bahwa PKK memberikan dukungan strategis, pelatihan, logistik, dan sumber daya militan kepada PYD beserta sayap militernya, YPG. Atas dasar itu, pemerintah Turki memandang PYD/YPG bukan sebagai organisasi yang terpisah dari PKK, melainkan sebagai bagian dari jaringan yang sama sehingga dianggap sebagai ancaman terhadap keamanan nasional Turki (Soner, et al. 2017).

PYD berdiri tahun 2003, dibentuk oleh para aktivis Kurdi. Tokoh utama dari pendirian PYD adalah Saleh Muhammad Muslim dan Ayse Abdullah. Pembentukan PYD di Suriah oleh PKK merupakan antisipasi jika terjadi pelemahan kepada bangsa Kurdi. PYD tetap menjadi penguasa di Suriah utara serta tidak terlepas dari pengaruh kuatnya PKK, bahkan saat ingin memutuskan kebijakan. Eksistensi PYD di wilayah Suriah utara semakin menjadi perhatian, baik dari dalam maupun luar negeri. Hal ini berdampak terhadap dukungan kepada PYD yang semakin banyak. Walaupun pada prakteknya PYD cenderung otoriter dengan mengesampingkan kelompok Kurdi yang lain, tetapi tetap bisa mengontrol dan mendominasi kekuatan Kurdi di Suriah utara. YPG juga mendapatkan dana dari Amerika Serikat sebesar 300 juta USD untuk membantu dan melatih SDF (*Syrian Democratic Forces*) pada tahun 2020, dimana mayoritas komponennya berasal dari YPG (Nabiyyin, 2020). PYD dan YPG sebenarnya didukung oleh Barat khususnya Amerika Serikat dalam menghadapi rezim Bashar Al-Assad dan teroris ISIS. Tapi di sisi lain, barat tetap menilai PKK sebagai organisasi teroris (Ali et al., n.d.).

Pada tahun 2014, terjadi konflik di wilayah Kobane antara kelompok YPG dengan ISIS. Hadirnya ISIS di wilayah tersebut memberikan dampak langsung kepada Turki. Konflik ini membuat gelombang aksi demonstrasi protes orang-orang Kurdi di Turki untuk pemerintah Turki mengambil sikap mendukung YPG melawan ISIS. Pemerintah Turki melarang kelompok PKK dan etnis Kurdi di Turki untuk turut membantu YPG melawan ISIS serta menutup perbatasan Turki dan Suriah (Luerdi, 2016). Bukan hanya itu, aksi tersebut berujung ricuh dan pemerintah Turki menilainya sebagai bentuk pengkhianatan. Pasifnya sikap Turki karena menganggap Kurdi di Suriah merupakan perpanjangan tangan dari kelompok Kurdi di Turki, tepatnya PKK. Pada akhirnya, bantuan datang dari Amerika Serikat, sehingga membuat YPG berhasil memukul mundur pasukan ISIS di wilayah Kobane. Keberhasilan ini membuat nama YPG semakin terpandang dan terlihat di mata internasional (Nabiyyin, 2020).

Untuk menghadapinya, Turki melakukan berbagai cara termasuk menjalankan operasi militer lintas batas di wilayah Irak utara. Terdapat beberapa operasi militer seperti operasi *Olive Branch* dan operasi *Euphrates Shield* yang menjadi salah satu strategi mengamankan wilayah perbatasan. Turki menganggap ancaman dari PKK merupakan hal serius yang harus ditanggapi karena bisa berdampak kepada stabilitas Turki. Tidak hanya operasi militer, Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan juga melakukan kebijakan dalam negeri berhubungan dengan isu Kurdi, misalnya mengisolasi partai politik pro-Kurdi seperti Partai Demokratik Rakyat (HDP) bahkan melakukan upaya represi kepada jurnalis. Turki juga menjalin kerjasama dengan Rusia dan AS, yang dinilai memiliki kepentingan juga. Turki mendukung FSA (*Free Syrian Army*), atau dikenal sebagai SNA (*Syrian National Army*) untuk menumbangkan Bashar Al-Assad (Nabiyin, 2020).

Selain itu, Turki juga melakukan operasi *Peace Spring* menjadi salah satu operasi lintas batas Turki ke wilayah Suriah utara, bertujuan untuk memukul mundur pasukan YPG. Turki berupaya membangun "Safe Zone" di sepanjang perbatasan Turki dan Suriah, sekaligus dapat menampung pengungsi. Melalui operasi ini juga menjadi salah satu cara untuk mengantisipasi adanya wilayah otonomi Kurdi yang dikuasai oleh PYD/YPG dan PKK. Operasi *Peace Spring* juga dapat meningkatkan *bargaining position* Turki di mata internasional serta unjuk gigi bahwa Turki bisa bertindak unilateral dalam kebijakan luar negerinya dalam bidang keamanan. Namun, banyak negara yang menyayangkan serangan ini karena dianggap dapat memperparah krisis kemanusiaan di Suriah (Apriliyanto, 2021).

Penelitian ini berfokus pada pembahasan mengenai bagaimana kebijakan operasi lintas batas Turki ke Suriah utara pada 2016-2019, melalui operasi *Euphrates Shield*, *Olive Branch*, dan *Peace Spring*. Pada artikel ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan studi dokumentasi dan wawancara. Melalui penelitian ini juga menunjukkan keterlibatan di Suriah dan kawasan untuk mengamankan kepentingan nasionalnya. Hal ini karena Turki menilai jika terjadi ekspansi PYD/YPG dapat menjadi ancaman berarti bagi kedaulatan Turki. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih banyak membahas satu operasinya dan pembahasan secara umum invasi Turki ke Suriah. Penelitian ini memiliki kebaruan dari sisi adanya upaya memahami persepsi ancaman di pihak Turki atas ekspansi dari PYD/YPG di wilayah perbatasan Turki dan Suriah untuk membuat wilayah otonomi Kurdi. Selain itu, penelitian ini juga menjelaskan upaya Turki dalam mendominasi regional dengan invansi ke Suriah utara.

### **Perspektif Neorealisme Ofensif John Mearsheimer**

Neorealisme merupakan salah satu paradigma dalam Hubungan Internasional. Paradigma ini menilai bahwa negara menjadi aktor dominan dalam hubungan internasional, mementingkan diri sendiri, serta menganggap struktur internasional anarkis sehingga tidak ada otoritas yang dapat mengganggu kebijakannya. John Mearsheimer dalam bukunya “The Tragedy of Great Power”, secara garis besar menjelaskan kebijakan suatu negara terhadap pihak lain untuk mendapatkan peluang meningkatkan kekuatan dan dominasinya sehingga dapat mengorbankan pihak lain tersebut.

Terdapat *bedrock principles* atau asumsi dasar yang menjadi landasan Mearsheimer pada teori realisme ofensif di dalam bukunya. Pertama, sistem internasional yang anarki, dimana tidak ada otoritas lebih tinggi di atas negara dan tidak ada pemerintahan dunia yang bisa menjamin keamanan negara. Kedua, negara punya kemampuan militer ofensif. Dalam hal ini setiap negara memiliki kemampuan untuk menyerang atau bisa mengembangkan kemampuannya tersebut. Ketiga, negara tidak harus sepenuhnya percaya dengan negara lain. Menurut Mearsheimer, tidak ada negara sepenuhnya mengetahui niat dari negara lain dalam jangka panjang, bisa saja saat ini menjadi teman, tapi di masa depan justru melakukan tindakan ofensif. Keempat, tujuan negara adalah memastikan kelangsungan hidup. Setiap negara wajib menjaga kelangsungan hidup atau eksistensi negaranya. Oleh sebab itu, negara dapat peka terhadap sesuatu hal yang dinilai mengancam. Terakhir, negara merupakan aktor rasional. Maksudnya, negara bisa mempertimbangan strategi untuk mencapai kepentingan nasionalnya khususnya dalam bidang keamanan dan pertahanan (Mearsheimer, 2001).

Mearsheimer mengungkapkan neorealisme defensif menurut Waltz, kondisi anarki pada sistem internasional dapat mendorong negara hanya lebih bertahan untuk menjaga keseimbangan kekuatan yang ada (*balance of power*). Keseimbangan ini bertujuan untuk mempertahankan status quo negara tersebut dalam sistem internasional (Mearsheimer, 2001). Mearsheimer juga menyebut bahwa Neorealisme Ofensif John Mearsheimer adalah realisme struktural, yaitu kondisi sistem internasional yang anarki dapat membuat negara membuat kebijakan tertentu untuk bersikap.

Secara garis besar, teori ini dapat menjelaskan bagaimana tindakan suatu negara untuk mendapatkan kekuatan sebesar-besarnya dan mempertahankan keamanan negaranya. Negara yang menjalankan teori ini dianggap bisa bertahan untuk menghadapi persaingan yang ada di dunia ini. Sejarah telah menunjukkan, negara yang

tidak menjalankan prinsip ini kerap kali mendapatkan akibat negatif. Selain itu, negara juga bisa memperlebar pengaruh atau dominasinya terhadap negara lain.

Kebijakan operasi lintas batas Turki di perbatasan Turki dan Suriah menjadi salah satu contoh untuk menjelaskan teori ini. Secara proaktif, Turki melakukan berbagai serangan kepada PYD/YPG yang selama ini dianggap sebagai ancaman serta mencegah pembentukan daerah otonom Kurdi. Oleh sebab itu, tidak hanya untuk mempertahankan wilayah perbatasannya saja. Kebijakan-kebijakan ini juga dinilai sebagai ajang untuk menunjukkan kekuatan Turki di mata internasional. Apalagi, akibat ketegangan Turki dengan PYD/YPG membuat hubungan Turki dengan Amerika Serikat juga renggang. Namun, Turki tetap menjalankan kebijakan ini dan menyatakan sebagai negara yang independen dan mementingkan kepentingan nasionalnya. Dari kasus ini, Turki bisa mendapatkan peluang untuk menyebarkan pengaruhnya di geopolitik timur tengah. Selain menghadapi ancaman ekspansi dari PYD/YPG, melalui teori ini dapat menjelaskan operasi militer Turki lebih dari menghadapi ekspansi. Turki dapat unjuk gigi bahwa negaranya punya posisi yang jelas untuk mengamankan dari sebuah ancaman.

### **Dinamika Gerakan Kurdi di Suriah**

Pecahnya orang-orang Kurdi ke empat negara tersebut akibat perang dunia pertama ketika Kesultanan Ottoman kalah dan wilayahnya dikuasai oleh sekutu. Pihak sekutu membagi wilayah-wilayah tersebut hingga menjadi masing-masing negara terpisah. Pembagian wilayah ini membuat suku Kurdi terpecah dan tersebar di beberapa negara. Dengan terpecahnya orang-orang Kurdi memicu gerakan separatis yang terjadi untuk membuat negara otonom bangsa Kurdi. Suku Kurdi menempati wilayah Timur Tengah, tapi bukan menjadi bagian dari etnis Timur Tengah sering dinilai tragis, karena tidak memiliki wilayah khusus tersebut.

Salah satu gerakan perlawanan Kurdi yang cukup masif terjadi di wilayah Turki. Partiya Karkeren Kurdistan (PKK) mengorganisir masa dari bangsa Kurdi untuk membuat perlawanan terhadap pemerintah Turki. Konflik keduanya terjadi karena banyaknya perbedaan pandangan yang berhubungan dengan masalah sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Dari pandangan politik, Kurdi di Turki meminta kepada pemerintah untuk diberikan wilayah otonom di tenggara Turki. Namun, permintaan tersebut tidak diindahkan dengan alasan stabilitas politik dan menjaga keutuhan nasional Turki. Sementara dari sisi ekonomi, Turki bagian utara menjadi wilayah dengan penghasil minyak dan gas di perbatasan Irak, sehingga sangat rugi bagi Turki jika harus melepas wilayah tersebut. Selain itu, jika dituruti sangat dikhawatirkan akan membangun gerakan yang lebih luas, bahkan menuntut negara otonomi sendiri bagi bangsa Kurdi.

Hampir dua dasawarsa tunduk kepada pemerintah Turki, bangsa Kurdi mulai melakukan perlawanan melalui gerakan PKK tersebut, yang dipimpin oleh Abdullah Ocalan. Berdirinya PKK menjadi pintu awal perjuangan Kurdi untuk memperjuangkan kemerdekaannya. Gerakan ini juga menjadi simbol untuk terus tumbuh bagi etnis Kurdi.

Sebagai pemerintah berdaulat, Turki merespon kehadiran PKK ini sebagai pencipta teror. Apalagi bagi kalangan militer Turki, PKK dianggap bisa menciptakan ketidakstabilan, memperlemah kondisi ekonomi, dan memecah politik serta integritas dalam negeri Turki. PKK juga kerap kali melakukan aksi-aksi teror, yang dianggap sebagai ancaman bagi Turki. Dengan alasan ini juga, Turki merasa berhak untuk melawan atau menghancurkan basis-basis PKK di wilayah tenggara Turki dan perbatasan dengan Suriah (Nabiyyin, 2020).

Situasi ini membuat hubungan antara etnis Kurdi dengan pemerintah Turki menjadi tegang. Muncul rasa tidak saling percaya di antara keduanya dan masing-masing pihak memandang pihak lain sebagai ancaman. Setelah runtuhnya Kesultanan Ottoman, terjadi pembagian wilayah yang hasilnya dipandang buruk oleh etnis Kurdi karena mereka tidak mendapatkan wilayah bersatu, melainkan terpisah-pisah. Sebagian etnis Kurdi diintegrasikan ke wilayah Turki hingga pada akhirnya, situasi membuat konflik keduanya pecah dan tak bisa dihindari (Fajariyadi, 2023). Turki juga beberapa kali melakukan operasi militer lintas batas di perbatasan utara Irak dan utara Suriah, yang dinilai sebagai basis Kurdi baik PKK, PYD, dan YPG (Puspaningrum, 2022). Selain itu, terjadi pengeboman terhadap aktivis muda yang melakukan demonstrasi di Kota Suruc pada tahun 2015, diakibatkan oleh bom bunuh diri. Dengan adanya insiden ini membuat hubungan Turki dan Kurdi semakin memburuk. Turki pun membuat keputusan untuk kontra terorisme dengan upaya kekuatan militeristik. Hal ini juga berdampak kepada perbatasan Turki khususnya dengan Suriah, dimana harus menghadapi ancaman ekspansi dari PYD/YPG serta dalam negeri dari PKK. Pemberian wilayah otonom memang jadi tuntutan. Namun, stabilitas dan keutuhan Turki menjadi lebih utama baginya.

Kekuatan PYD semakin bertambah saat tergabung dalam pembentukan *Syria Defense Force* (SDF) yang menjadi kekuatan militer nasional bagi kelompok-kelompok Kurdi, orang Arab, dan kelompok lainnya khususnya di Suriah. Kelompok lain yang tergabung dalam SDF antara lain YPG, koalisi Arab Suriah, Ahrar Al Zawiya, Brigade Martir Atareb, Brigade Sultan Selim, Brigade Revolusioner Raqqa, dan Brigade Syams Al Shamal. SDF dibentuk atas kehendak AS yang ingin membangun kekuatan untuk menggulingkan pemerintahan Bashar Assad di Suriah. YPG yang merupakan sayap militer dari PYD sangat mendominasi pengaruhnya di SDF. Dominasi PYD/YPG di SDF menjadi modal kekuatannya untuk menguasai seperempat wilayah Suriah (Hafizurrahman, 2023). Walaupun menguasai daerah-daerah di Suriah hingga terbentuk

Rojava, Kurdi Suriah tidak memperjuangkan kemerdekaannya tapi membentuk pemerintahan yang lebih besar dan kuat dari pemerintahan lokal. Dominasi kekuatan baik politik dan militer membuat posisi PYD/YPG semakin kuat ini membuat Turki merasa terancam, terutama atas potensi ekspansi wilayah.

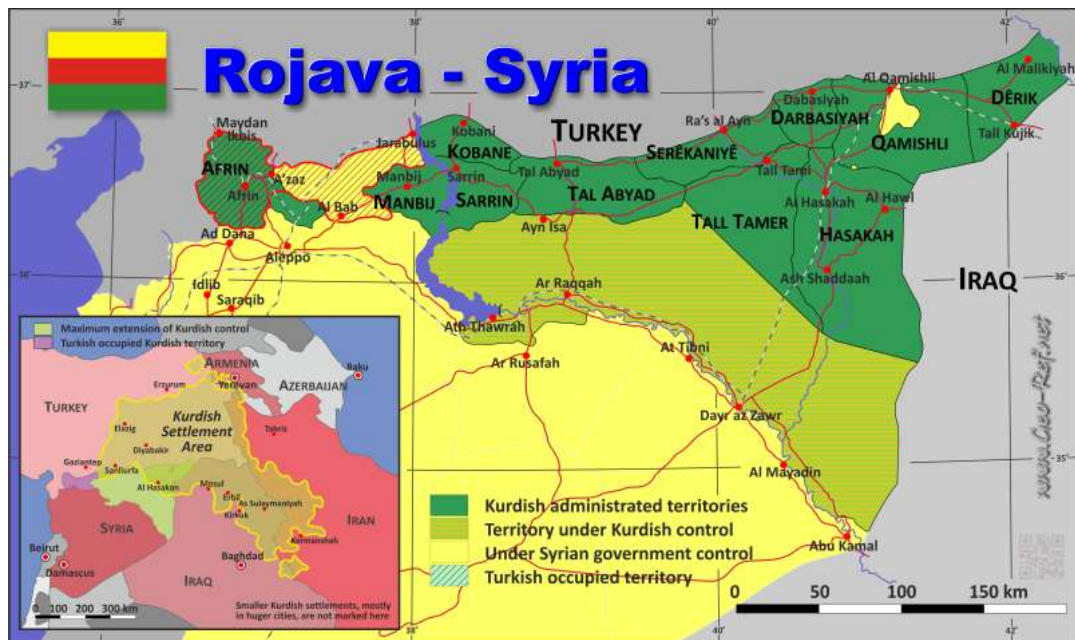
PYD memang memiliki hubungan erat dengan PKK di Turki, tapi mereka tidak masuk ke dalam kategori organisasi teroris menurut Amerika Serikat, Uni Eropa, hingga Kanada. Tetapi bagi Turki, PYD/YPG dan PKK sama saja, dianggap sebagai teroris yang mengancam kedaulatan Turki (Ascha, 2018). Transformasi ide dari PKK ke PYD menunjukkan tidak adanya entitas Kurdi yang terpisah baik di Turki maupun Suriah. Mereka sama-sama menuntut untuk dapat wilayah yang bisa menegakan *democratic confederalism* seperti pemikiran Abdullah Ocalan. Awal pembentukan PYD dipimpin oleh Fuat Omar dan pada tahun 2011 sampai saat ini dipimpin oleh Muhammad Muslim & Ayse Abdullah. Pengaruh PKK terhadap PYD sangatlah besar dan kuat, termasuk dalam pengambilan keputusan oleh PYD yang diduga ada campur tangan pemimpin PKK.

Sayap militer PYD, yaitu YPG, yang dilatih oleh sayap militer PKK yaitu Hezen Parastina Gel (HPG) atau *People's Defense Forces*. YPG telah dibentuk sebelum perang Suriah pecah, bertugas untuk mengawasi wilayah perbatasan area Kurdi atau lebih dikenal Rojava. YPG juga melakukan penjagaan terhadap pos-pos pemeriksaan, akses jalan, dan menjamin di gedung-gedung pemerintahan (International Crisis Group, 2013). Setelah meletusnya perang pemberontakan kelompok-kelompok Islamis (berafiliasi dengan Al Qaida dan ISIS, juga disebut 'jihadis'), pemerintah Bashar Al-Assad tidak mampu mengontrol kawasan Suriah Utara, sehingga membuat PYD/YPG lebih leluasa menguasai beberapa wilayah Suriah bagian utara. Pemerintahan Suriah seakan-akan memberikan hak kepada PYD; sebagian menilai kebijakan ini terjadi karena PYD dinilai memiliki musuh yang sama yaitu para 'jihadis.' Namun, sebenarnya antara PYD/YPG dan pemerintah Suriah bukanlah kawan sejati, tapi karena adanya kepentingan bersama. PYD/YPG melakukan hal ini supaya bisa mendapatkan wilayah otonom yang dikelola. Pada pertengahan 2014, PYD mengklaim telah memiliki 50.000 pejuang Kurdi yang telah bergabung (Siahaan, 2019).

Upaya ekspansi PYD/YPG sebenarnya telah berlangsung saat terjadi fenomena Arab Spring di tahun 2012. Pasukan PYD/YPG mengisi kekosongan di wilayah Suriah utara yang juga berbatasan dengan Turki akibat penarikan pasukan militer pemerintah. Pada akhirnya, wilayah-wilayah itu disebut Rojava. Rojava sendiri terbagi jadi tiga zona wilayah otonom yaitu Cizire (al-Jazira), Efrin (Afrin), dan Kobane (Ayn Al-Arab). Ketiga zona ini disebut sebagai kanton, dikelola secara federal. Hadirnya Rojava menjadi salah satu masalah utama dalam konflik di Timur Tengah yang diwujudkan karena ketidakmampuan dalam merangkul sebuah perbedaan dan satu kesatuan wilayah.

Kekuasaan PYD/YPG di Rojava bisa menjadi masalah yang sangat kompleks dan tidak bisa diabaikan begitu saja. Konflik di Timur Tengah dengan rata-rata bercorak sektarian muncul karena adanya perbedaan mulai dari agama, ras, suku, bangsa, dan lain sebagainya. Kekuasaan Kurdi di bawah dominasi PYD/YPG di Rojava bisa menjadi kerangka konflik sektarian lebih besar hingga memicu gerakan separatisme yang lebih masif dan mengancam (Fiqri, 2021).

**Gambar 1: Lokasi Wilayah Otonom Kurdi**



*Sumber: geo-ref.net*

Gambar di atas menunjukkan secara detail lokasi wilayah otonom Kurdi di Suriah (Rojava). Warna hijau pada bagian utara seperti wilayah Afrin, Kobane, hingga Qamishli adalah wilayah yang berada di bawah teritori administrasi Kurdi. Rata-rata wilayah otonomi Kurdi berada di perbatasan Turki.

Ancaman PYD/YPG dapat dipahami melalui, pertama, aktor non negara yang bergerak seperti jalannya sebuah negara. PYD/YPG memiliki daerah bernama Rojava di wilayah Suriah utara dan berbatasan dengan Turki. Sistem otonomi seperti ini menjadi kekhawatiran karena bisa saja PYD/YPG semakin luas melakukan ekspansi wilayah kekuasaan ke perbatasan Turki dan Suriah. Kedua, kedekatan secara geografis antara PYD/YPG dengan Turki. Kedekatan ini bisa menjadi ancaman karena berbatasan

langsung yang membuat semakin mudah memantau atau bergerak. PYD/YPG pun kerap kali melakukan serangan atau aksi teror ke beberapa wilayah Turki. PYG/YPG juga bekerja sama dengan PKK dalam aksinya tersebut. Terakhir ada agenda nasionalisme Kurdi, yang paling diantisipasi oleh Turki. Secara domestik, Turki bisa mengeluarkan kebijakan-kebijakan nasional untuk menghabisi milisi Kurdi di Turki yaitu PKK. Tapi, dengan perpanjangan tangan di Suriah melalui PYD/YPG, milisi Kurdi menjadi punya gerakan alternatif dengan visi yang sama.

PYD/YPG juga sudah memenuhi kriteria sebagai ancaman bagi Turki dari eksternal yang berkembang di luar wilayah Turki. Ditambah dengan ancaman dari internal melalui PKK. Kondisi ini membuat dinamika konflik semakin kompleks. Ancaman datang dari luar negeri tetapi operasinya bisa mengganggu stabilitas dalam negeri Turki, apalagi dengan tambahan ancaman internal. PYD/YPG dengan kekuasaannya di Rojava dan sistem layaknya sebuah negara semakin menguatkan posisinya sebagai negara bayangan (Alatas, 2020).

### **Operasi Militer Turki ke Suriah Utara**

Kehadiran kekuatan PYD/YPG di Suriah utara dan merapat ke perbatasan Turki memicu kekhawatiran Ankara. Upaya ini jadi salah satu ekspansi dari PYD/YPG untuk memperluas kekuasaannya. Ditambah, PYD/YPG memiliki wilayah otonom Rojava dan bisa saja sistem wilayah ini semakin besar. Selain itu, kedekatan secara geografis juga menjadi ancaman bagi Turki karena kapan saja bisa terjadi serangan. Terakhir ada kedekatan dengan PKK, karena PYD/YPG menjadi perpanjangan tangan PKK. YPG berpotensi kuat untuk menguasai wilayah-wilayah di Suriah utara (Hafizurrahman, 2023). YPG berhasil menguasai wilayah Jarabulus, Al-Bab, dan utara Aleppo (Luerdi, 2016). Situasi ini membuat Turki melakukan pergeseran orientasi kebijakan luar negerinya menjadi kontraterorisme untuk mengamankan keamanan nasional. Kebijakan Turki menanamkan pengaruh dalam hal ini keterlibatan di Suriah justru membuat dirinya sadar adanya ancaman nyata diintegrasikan nyata akibat adanya PKK dan PYD/YPG (Ghazali, 2025).

“Secara umum kekuasaan itu diberikan kepada masyarakat Suriah seperti FSA, itu kan di beberapa wilayah Suriah utara. Kalau kita lihat dari tiga serangan itu *Euphrates Shield*, *Olive Branch*, dan *Peace Spring* itu yang di Tel Abyad, Eas al Ain, dan lain-lainnya, Turki tidak menjadikan itu wilayah teritori baru, tetap diberikan kepada milisi Suriah yang pro Turki walaupun ada tentara Turki. Secara umum kan wilayah itu dikuasai PKK (SDF/PYD/YPG), pasukan Assad pun gak berkuasa di situ.

Nah, makanya Turki masuk ke situ untuk memberikan pelatihan keamanan tapi kontrol masih dikuasai oleh milisi Suriah atau milisi anti Assad.” (Ghazali, 2025).

Pada tahun 2016-2017, Turki melakukan operasi *Euphrates Shield* di beberapa wilayah seperti Jarabulus, Al-Bab, dan utara Aleppo. Tujuan dari operasi ini untuk mencegah perluasan wilayah PYD/YPG di bagian barat sungai Eufrat dan menciptakan zona aman bagi pengungsi Suriah. Operasi *Olive Branch* pada tahun 2018 menjadi operasi lintas batas kedua Turki. Operasi ini bertujuan untuk mengusir pasukan PYD/YPG dari wilayah Afrin, menghentikan pengaruh Kurdi di wilayah barat laut Suriah, dan berupaya memperluas pengaruh pada oposisi pro-Turki (Kasapoglu & Ulgen, n.d.). Terakhir, pada tahun 2019 Turki menjalankan operasi Peace Spring. Operasi ini bertujuan untuk memukul mundur pasukan SDF yang dipimpin oleh YPG di lokasi Ras Al-Ayn hingga Tel Abyad atau timur sungai Eufrat (Perdana, 2019).

Serangan Turki ke Suriah utara khususnya wilayah perbatasan dapat dilihat dalam perspektif John Mearsheimer melalui teori Neorealisme Ofensif. Terdapat asumsi dasar yang menjadi landasan bagi Mearsheimer dalam bukunya *The Tragedy of Great Power Politics* (Mearsheimer, 2001). Pertama, sistem internasional itu anarki, tidak ada otoritas lebih tinggi di atas negara dan tidak ada pemerintahan dunia yang bisa menjamin keamanan negara. Operasi militer Turki ke Suriah utara tanpa harus menunggu dari otoritas tertentu seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau bahkan persetujuan dari aliansi NATO, dengan posisi Turki sebagai anggotanya. Hal ini menunjukkan kalau sistem internasional anarki, tidak ada konsensus kolektif secara pasti untuk menjamin keamanan negaranya. Ancaman hadir dari PYD/YPG yang meningkat di wilayah perbatasan, Turki bisa menjalankan caranya sendiri untuk mempertahankan keamanan nasionalnya.

Kedua, adanya kemampuan militer ofensif sebagai pondasi. Dalam hal ini setiap negara memiliki kemampuan untuk menyerang atau bisa mengembangkan kemampuannya tersebut. Dengan menunjukkan kapabilitas militer maksimum, negara bisa bergerak untuk mempertahankan negara bahkan mendominasi negara lain atau kawasan. Dalam operasi militernya, Turki melakukan mobilisasi pada kekuatan militer seperti mengerahkan tank Leopard 2A4, drone Bayraktar TB2, pasukan elit Turki, dan FSA (sekutu Turki di Suriah). Angkatan Udara Turki juga mengerahkan pesawat tempur varian F-16 dan F-4 2020 untuk melakukan operasi (Kasapoglu & Ulgen, 2018).

Kemampuan ofensif ini juga ditunjukkan oleh Turki sebagai isyarat bahwa dirinya mampu sebagai aktor rasional menjadi yang tegas mengedepankan kepentingan nasionalnya. Cara ini memanfaatkan hard power yang terukur untuk mempertahankan

wilayah dan menguasainya baik langsung ataupun tidak. Kebijakan Turki untuk mengembangkan teknologi domestik seperti UAV juga menunjukkan cara Turki bisa memperkuat superioritas militer di kawasan. Upaya ini sejalan dengan teori Mearsheimer bahwa kepemilikan kekuatan fisik menjadi instrumen utama untuk memastikan kelangsungan suatu negara. Bukan hanya Turki dengan kemampuan serangnya, pasukan PYD/YPG juga memiliki kemampuan bersenjata serta kontrol atas wilayah otonom di Suriah utara. Hal ini menjadi ancaman langsung bagi Turki karena dengan kekuatannya sewaktu-waktu bisa melakukan serangan.

Ketiga, suatu negara tidak harus sepenuhnya percaya dengan negara lain. Menurut Mearsheimer, tidak ada negara sepenuhnya mengetahui niat dari negara lain dalam jangka panjang, bisa saja saat ini menjadi teman tapi di masa depan justru melakukan tindakan ofensif. Setiap negara juga tidak bisa mengetahui niat jangka panjang dari negara lain sehingga harus lebih siap menghadapi kemungkinan terburuk. Turki sebagai anggota NATO tentu berhubungan erat dengan AS. Akan tetapi, akibat konflik dengan PYD/YPG, hubungan Turki dan AS terjadi ketegangan. Dalam konflik ini, AS memberikan dukungan kepada milisi YPG, sedangkan Turki menganggapnya sebagai cabang atau perpanjangan tangan dari PKK. Operasi militer ini merupakan langkah rasional bagi Turki dalam menghadapi dilema keamanan hingga adanya ketidakpercayaan dengan sekutunya sendiri.

Keempat, tujuan negara adalah memastikan kelangsungan hidup atau survive. Setiap negara wajib menjaga kelangsungan hidup atau eksistensi negaranya. Oleh sebab itu, negara dapat peka terhadap sesuatu hal yang dinilai mengancam termasuk dengan agresi untuk menjamin eksistensinya. Kehadiran wilayah Rojava sebagai otonomi Kurdi di perbatasan Turki dan Suriah dianggap sebagai ancaman eksternal yang nyata. Apalagi ditambah jaringannya dengan PKK, yang membuat milisi Kurdi makin kuat. Tiga operasi militer oleh Turki ke Suriah utara untuk mengatasi ancaman tapi mencegah efek yang lebih besar yaitu gerakan Kurdi. Tindakan ofensif inilah yang menjadi strategi buat kelangsungan hidup dari suatu negara.

Terakhir, negara juga merupakan aktor rasional. Maksudnya, negara bisa mempertimbangan strategi untuk mencapai kepentingan nasionalnya khususnya dalam bidang keamanan dan pertahanan. Pertimbangan inilah menjadi alasan negara bergerak melakukan sebuah operasi. Turki menjalankan operasi militer di Suriah utara bukan serta merta hanya sebuah serangan biasa, tapi karena adanya ancaman. Dalam melakukan operasi, negara juga harus menghitung berapa biaya dan dampak yang akan dirasakan. Turki juga memperluas pengaruh di Suriah utara tersebut, sejalan dengan asumsi Mearsheimer bahwa setiap negara punya keinginan menyebarkan pengaruhnya.

Walaupun wilayah tersebut diberikan kepada pihak oposisi Suriah yang menjadi aliansi Turki.

### **Operasi *Euphrates Shield***

Operasi Euphrates Shield (OES) pertama kali diluncurkan pada tanggal 24 Agustus 2016 sebagai tindakan upaya membela diri (Yeşiltaş et al., 2017). Dalam operasi ini, Turki menargetkan pasukan Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) dan yang utama yaitu milisi Kurdi, Partiya Yekitîa Demokrat (PYD) serta sayap militernya yakni Yekineyen Paratîna Gel (YPG). Operasi ini tidak hanya melibatkan militer Turki (TAF) tapi juga pasukan oposisi Suriah, Free Syrian Army (FSA). Operasi Euphrates Shield jadi salah satu operasi ambisius dalam sejarah Republik Turki. Tujuan strategis dari OES sebenarnya mencakup beberapa pilar yaitu memukul atau mengusir DAESH (ISIS) dari perbatasan, mencegah ekspansi PYD/YPG lebih luas, serta ingin menciptakan zona aman di titik tertentu. Pasukan militer Turki atau TAF juga terdiri dari Komando Angkatan Darat dan Batalyon dari Komando Pasukan Khusus (Special Force)(Yeşiltaş et al., 2017).

Pada fase pertama operasi ini disebut dengan fase Jarablus – Sajur (24-28 Agustus 2016). Dalam fase ini menunjukkan bahwa operasi ini dijalankan sebagai operasi gabungan. OES dimulai dengan serangan artileri jarak menengah serta peluncuran roker MLRS. Serangan pertama dilakukan ke wilayah yang dikuasai ISIS dekat dengan Jarablus dan wilayah Keklice pada 04.00 pagi. Selanjutnya masuk ke fase Cobanbey (Rai) – Dabiq (3 September-16 Oktober 2016). Adanya keterlibatan AS membuat Turki harus menunda operasi ke wilayah Manbij. Namun, Turki tetap melanjutkan serangan ofensif ke wilayah Cobanbey dan sekitarnya pada 3 September 2016. Pada fase ini, serangan juga dimulai dengan tembakan artileri serta serangan udara. Fase Dabiq – al-Bab (17 Oktober-20 Desember 2016) semakin kompleks dengan keterlibatan pemerintah Suriah dan mulai masif melakukan serangan ke PYD/YPG di daerah Mare. Pada fase ini, pasukan Turki menggunakan operasi darat untuk melawan pasukan PYD/YPG dan udara untuk menghadapi pasukan pemerintah. Pasukan Turki melaju ke wilayah al-Bab dengan meluncurkan serangan udara ke PYD/YPG di wilayah Maarat Umm Hawsh pada 20 Oktober 2016. Serangan ini mengakibatkan 200 orang teroris tewas dan membuat PYD/YPG ke arah al-Bab melambat serta mencegah terhubungnya jalur Afrin-Manbij dari al-Bab (Yeşiltaş et al., 2017).

Pada operasi ini, Turki terdapat capaian yang didapat oleh Turki. Pada operasi Euphrates Shield, Turki berhasil memukul mundur YPG dari beberapa wilayah sepetri Jarabulus, Al-Bab, dan utara Aleppo. Selain itu, gerakan PYD/YPG ke arah al-Bab juga melambat. Turki juga mencegah terhubungnya jalur Afrin-Manbij dari al-Bab (Yeşiltaş et

al., 2017). Namun, upaya Turki untuk memindahkan pasukan ke timur sungai Eufrat belum berhasil, karena ada bayang-bayang dari AS. Setelah operasi Euphrates Shield, Turki melakukan stabilitas mencakup pembangunan infrastruktur. Kebijakan ini juga dilakukan bersama FSA, fokus terhadap keamanan, bantuan kemanusiaan, serta pembangunan ekonomi. Selain itu, dilakukan pembersihan ranjau akibat operasi dan memberikan pelatihan bagi aparat keamanan lokal. Tujuannya adalah mencegah terjadinya kekacauan di kemudian hari (Yeşiltaş et al., 2017).

### **Operasi *Olive Branch***

Operasi ini pertama kali dijalankan pada 20 Januari 2018. Operasi ini bertujuan untuk memukul mundur dan menghentikan pengaruh dari pasukan *Partiya Yekitiya Demokrat* (PYD) dengan sayap militernya yaitu *Yekineyen Parastina Gel* (YPG) baik dari militer maupun politik. Bagi Turki, PYD/YPG dianggap sebagai jaringan perpanjangan tangan dari *Partiya Karkeren Kurdistan* (PKK) yang berupaya membangun wilayah otonom Kurdi. Kebijakan operasi ini diambil Turki sebagai respon kepada Amerika Serikat (AS) karena inisiasinya untuk membentuk pasukan dengan 30.000 personel dalam membantu *Syria Defense Force* (SDF). Pasukan SDF didominasi oleh milisi PYG/YPG (Kasapoglu & Ulgen, 2018).

Fase awal pada operasi *Olive Branch* dimulai melalui serangan udara yang sangat signifikan dan dilanjutkan dengan serangan darat ke beberapa titik di wilayah pegunungan yang mengelilingi daerah Afrin. Pada hari pertama, Turki meluncurkan 72 pesawat tempur sebagai fase pembuka operasi ini. Sebanyak 72 pesawat tempur dikerahkan untuk menyerang 108 titik target di 7 sektor pada fase pembuka. Angka ini dapat dikatakan tinggi dalam upaya operasi militer lintas batas yang dilakukan Turki pada beberapa tahun sebelumnya.

Strategi penggunaan Angkatan Udara Turki pada operasi *Olive Branch* sesuai dengan *rapid dominance* yang berarti kemampuan bergerak cepat dan dapat memengaruhi keinginan musuh baik fisik maupun secara psikologis. Dalam konteks ofensif, serangan ini menjadi bukti memaksimalkan kekuatan militer yang dimiliki untuk mempertahankan negara. Wilayah Afrin dikelilingi dengan pegunungan yang menjadi karakter operasi ini sebagai operasi pegunungan. Turki menjalankan operasi ini hingga pusat Afrin, yang membuat pergeseran dari perang di pegunungan menjadi di perkotaan. Pada fase perang darat ini, militer Turki dinilai lebih berpengalaman dibanding pasukan PYD/YPG (Arum, 2018).

Operasi Olive Branch juga memperlihatkan adanya peningkatan dalam koordinasi antara angkatan udara dengan artileri darat. Operasi Olive Branch ke Suriah utara bukan merta hanya merasa terancam dari adanya pasukan PYD/YPG tapi sebagai tanda Turki sebagai aktor berpengaruh di Suriah. Keberhasilan Turki dalam melemahkan PYD/YPG di Afrin menunjukkan posisinya sebagai aktor dominan dalam dinamika kekuasaan di wilayah utara Suriah (Kasapoglu & Ulgen, n.d.).

### **Operasi *Peace Spring***

Pada tahun 2019, pemerintah Turki menjalankan kebijakan untuk membangun zona aman (safe zone) dari berbagai ancaman khusus organisasi teroris. Upaya pembentukan zona aman ini bertujuan supaya pengungsi Suriah yang menetap di Turki bisa kembali ke negaranya. Namun, upaya untuk membangun zona aman terdapat masalah yang dihadapi. Pertama, wilayah perbatasan Jarablus hingga Al Malikiyah (Suriah bagian timur laut) dibawah komando pasukan Syrian Defense Force (SDF). Pasukan ini dipimpin dan dikuasai oleh Partai Yekitia Demokrat (PYD) atau Yekiteren Parastina Gel (YPG). Turki membangun zona aman ini dengan dua fungsi sebagai buffer zone umum dan humanitarian buffer zone (Beehner & Meibauer, 2016).

“Kalau saya melihat buffer zone itu tidak dalam intensi dalam proses aneksasi wilayah, jadi polanya beda seperti Israel yang buat buffer zone untuk dianeksasi, untuk menguasai, kayak urusan Golan, Sinai, jadi aneksasi dilakukan buat jaring pengaman. Tapi beda sama Turki, itu dia bahasanya saya lebih menggunakan daerah tampon, karena kalau daerah tampon itu penguasaan turki menjadi aktor memberikan support iya, tapi bukan aktor dominannya. Jadi aktor dominannya tetap kelompok FSA di situ, karena memang dinamikanya di suriah cukup kental jadi wilayah tampon itu perlu dilakukan,” (Nurwijoyo, 2025).

Mengenai pembuatan zona aman, Turki mengklaim bahwa rencana pembuatan zona aman ini bukan hanya menguntungkan Turki tapi juga pemerintah Suriah (Nyanendra & Islam, 2020). Pertama, zona aman akan menjadi tempat aman bagi para pengungsi Suriah untuk kembali ke negaranya. Kedua, pasukan SDF yang dipimpin pasukan YPG bisa menjauh dari perbatasan Turki dan Suriah yang mengganggu ancaman nasional Turki. Ketiga, pemerintah Suriah bisa melakukan konsolidasi wilayahnya yang terpecah-pecah akibat perang saudara.

Pembentukan zona aman ini pada akhirnya menjadikan masyarakat Suriah yang mengontrol langsung khususnya Free Syrian Army (FSA), yang menjadi aliansi Turki dan oposisi dari pemerintahan Bashar Al-Assad. Walaupun demikian, pembangunan zona aman di Suriah utara sebenarnya memberikan pengaruh secara politik, maupun militer kepada FSA. Turki punya pengaruh secara politik, keamanan, juga pelatihan dan segala macam yang diberikan Turki untuk orang-orang FSA. Dalam konteks ini, kehadiran Turki mencerminkan strategi perluasan pengaruh regional yang jelas dan menjadi indikator eksistensi kekuatan Turki di kawasan. Efek ganda dari strategi ini menegaskan posisi Turki sebagai aktor militer yang semakin asertif melalui penggunaan kekuatan dan sumber daya yang diperbarui (Nurwijoyo, 2025).

Dalam operasi ini, Turki meningkatkan perlindungan terhadap kendaraan tempur dengan menggunakan sistem pelindung seperti RPG Cage Armor produksi ROKETSAN, serta mengerahkan platform hibrida ZSU-23-2 sebagai dukungan tempur di wilayah perkotaan. Pada akhir serangan ini, Turki mampu mengontrol 160 permukiman dengan total wilayah 2.200 km<sup>2</sup> serta menetralkan 775 teroris. Pemerintah Turki menggunakan kata tersebut untuk menggambarkan keadaan teroris yang terbunuh, tertangkap, atau bahkan menyerah. MoU Sochi juga memfasilitasi gencatan senjata pasukan Turki dan SNA dengan pasukan SDF, akan tetapi kontak senjata juga masih terjadi pasca kesepakatan tersebut dibuat (Apriliyanto, 2021).

Turki juga menekankan untuk mengembalikan para pengungsi ke zona aman, sehingga harus memastikan kawasan tersebut bisa bebas dari teroris. Pada tahun 2019, Turki mulai membuka kawasan zona aman tersebut untuk para pengungsi, tapi belum cukup dapat dukungan khususnya masalah di sektor finansial dari sekutunya. Walaupun demikian, Turki tetap membiayai kepulangan para pengungsi ke zona aman di Suriah (Mohsen & Tarawneh, 2021).

## Simpulan

Konflik antara Turki dan gerakan Kurdi merupakan persoalan kompleks yang sudah lama berakar. Kurdi jadi salah satu etnis terbesar di dunia yang tersebar di Turki, Irak, Iran, dan Suriah, tapi tidak memiliki negara berdaulat. Kondisi ini membuat gerakan Kurdi masif dan sering kali dianggap sebagai ancaman bagi pemerintah Turki. *Partiya Karkeren Kurdistan* (PKK) di Turki jadi simbol perjuangan bagi orang Kurdi. PKK juga melebarkan sayap di Suriah dengan *Partiya Yekitia Demokrat* (PYD) dan *Yekineyen Parasitas Gel* (YPG). Kehadiran PYD/YPG menjadi kekhawatiran bagi Turki. Hal ini karena PYD/YPG memiliki hubungan dengan PKK. Selain itu, sering kali melakukan serangan di

beberapa wilayah Turki bersama PKK, serta pemasangan ranjau di dekat wilayah perbatasan.

Kekuatan PYD/YPG di Suriah utara juga menjadi kekhawatiran Turki, karena bisa ekspansi lebih besar ke wilayah-wilayah lain yang berbatasan dengan Turki. Dalam menghadapi ancaman ini, Turki melakukan berbagai operasi militer dalam periode 2016-2019, antara lain operasi *Euphrates Shield*, *Olive Branch*, dan *Peace Spring*. Tujuan utama dari berbagai operasi ini adalah untuk melemahkan keberadaan basis militan Kurdi di sepanjang perbatasan Suriah-Turki, mencegah munculnya entitas otonom Kurdi di wilayah utara Suriah, serta membentuk zona aman demi kepentingan strategis nasional Turki. Di samping itu, Turki turut membangun aliansi regional, termasuk bekerja sama dengan Partai Demokratik Kurdistan (KDP) di Irak dan menjalin diplomasi aktif dengan negara-negara seperti Rusia dan Iran sebagai langkah penyeimbang terhadap kebijakan Amerika Serikat yang dianggap ambigu karena mendukung YPG dalam perang melawan ISIS.

Namun, kebijakan Turki terhadap kelompok Kurdi menuai kecaman baik dari dalam negeri maupun komunitas internasional karena dinilai mengekang hak asasi manusia, membatasi kebebasan berekspresi, dan menekan kelompok sipil pro-Kurdi, termasuk dengan penahanan terhadap politisi dan jurnalis. Penelitian ini memiliki signifikansi untuk memberikan wawasan mendalam terkait kebijakan luar negeri dan strategi keamanan nasional Turki dalam merespons konflik etnis yang berdampak lintas batas. Melalui analisis hubungan antara Turki dan PYD/YPG, dapat dipahami bagaimana aktor non-negara dapat mendorong negara untuk menerapkan kebijakan militer yang bersifat ofensif guna mempertahankan stabilitas internal dan kedaulatan teritorialnya. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi penting tidak hanya dalam ranah akademik studi hubungan internasional dan keamanan global, tetapi juga menjadi sumber acuan praktis dalam memahami pendekatan negara-negara terhadap ancaman separatisme dan intervensi lintas batas di kawasan konflik.

## Daftar Pustaka

- Alatas, M. (2020). Geopolitik dalam Studi Perbatasan Suriah-Turki. *Jurnal ICMES*, 4(1), 86-102. <https://doi.org/10.35748/jurnalicmes.v4i1.74>
- Apriliyanto, S. Analisis Kebijakan Luar Negeri Turki Dalam Melaksanakan Operation Peace Spring Di Suriah Tahun 2019 (Bachelor's thesis, Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

- Arum, U. N. (2019). Upaya Pemerintah Turki Dalam Mengatasi Perlawanan Kurdi Di Wilayah Afrin Dalam Krisis Suriah Tahun 2015-2018 (Doctoral dissertation, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta).
- Ascha, M. C. Analisis Kerja Sama Partai Pekerja Kurdi Dengan Kurdistan Regional Government Irak Dalam Menghadapi ISIS (2014-2015) (Bachelor's thesis, FISIP UIN Jakarta)
- Asyrofi, M. (2019). Dampak Isu Kurdi Suriah Terhadap Hubungan Bilateral Turki-Amerika (2014-2018) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Beehner, L., & Meibauer, G. (2016). The futility of buffer zones in international politics. *Orbis*, [online] 60(2), 248-265. Dalam: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0030438716000053> [Diakses 2 Maret 2026]
- Bernadette Aderi Puspaningrum. (2022). Turki Luncurkan Operasi Anti-teror Lintas Batas Targetkan Kelompok PKK di Irak Utara. *Kompas*, [online]. Dalam: <https://www.kompas.com/global/read/2022/04/19/180100470/turki-luncurkan-operasi-anti-teror-lintas-batas-targetkan-kelompok-pkk-di> [Diakses 2 Maret 2026]
- Fajariyadi, F. A. (2023). Analisis Konflik Kelompok Kepentingan Kurdi Dan Pemerintah Turki Tahun 2018 – 2023. Universitas Islam Indonesia. [online] Dalam: <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/47755/19323114.pdf?sequence=1&isAllowed=y> [Diakses 2 Maret 2026]
- Fiqri, M. N. (2021). Analisis Pengaruh Konflik Suriah terhadap Perjuangan Daerah Otonom-Kurdi Rojava menggunakan Method of Historical Structure (MHS) (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Ghazali, P. (2025, June 13). *Personal Interview*.
- Hafizurrahman, H. (2023). Intervensi Turki dalam Berupaya Menjaga Kepentingan Nasionalnya pada Konflik Suriah Periode 2014-2019. *Mutiara: Multidisciplinary Scientific Journal*, 1(6), 219-235.
- Heriono, M. J. (2024). Analisis Kebijakan Kontra Terorisme Turki Terhadap Pemberontakan PKK (2015-2020) Ditinjau dari Counterinsurgency Theory (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).

- International Crisis Group. (2013). Syria's Kurds, A Struggle Within a Struggle. [online] dalam: <https://www.crisisgroup.org/rpt/middle-east-north-africa/syria/136-syrias-kurds-struggle-within-struggle> [Diakses 2 Maret 2026]
- Kartanapura, A. D., & Situmorang, K. K. (2022). Invasi Turki terhadap Suriah: Sebuah Analisa. In *Jurnal Alternatif* [online] 2(1). Dalam: <https://ejournal-jayabaya.id/Alternatif/article/view/22/21> [Diakses 5 April 2026]
- Kasapoğlu, C., Ülgen, S., & Chairman, E. D. A. M. (2022). Turkey's Operation Olive Branch Enters A New Phase. Centre for Economics and Foreign Policy Studies. [online] Dalam: <https://edam.org.tr/wp-content/uploads/2018/03/Operation-Olive-Branch-Update2.pdf> [Diakses 13 Maret 2026]
- Kasapoğlu, C., Ülgen, S., & Chairman, E. D. A. M. (2022). Operation Olive Branch: A political-military assessment. Centre for Economics and Foreign Policy Studies. [online] Dalam: <https://edam.org.tr/wp-content/uploads/2018/01/Operation-Olive-Branch-01.pdf> [Diakses 10 Maret 2026]
- Luerdi, L. (2016). Intervensi Turki dalam Krisis Suriah (2011-2014). *International Society*, [online] 3, 33–50. Dalam: <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.5830875> [Diakses 7 Maret 2026]
- Mearsheimer, J. J. (2003). *The tragedy of great power politics*. WW Norton & Company.
- Mohsen, K., & Tarawneh, B. Al. (2021). Turkish Military Intervention in Northern Syria: Operation Peace Spring as a Model. *PalArch's Journal of Archaeology*. [online] Dalam: <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.16175.87209> [Diakses 3 Maret 2026]
- Nabiyyin, M. H. (2020). Strategi Pemerintahan Erdogan dalam Menghadapi Ancaman Politik dan Militer Suku Kurdi 2015-2019. *Jurnal ICMES*, [online] 4(1), 1-28. Dalam: <https://doi.org/10.35748/jurnalicmes.v4i1.76> [Diakses 2 Maret 2026]
- Nurwijoyo, A. (2025, June 18). *Personal Interview*.
- Nyanendra, I. N., & Islam, M. M. (2020). Transnational Operation, International Reaction, and Legitimacy: The Case of Turkey and Saudi Arabia. *Contemporary Review of Middle East* 7(3), 317-338. DOI: 10.1177/2347798920921965
- Perdana, A. V. (2019, October 10). Turki Mulai Lancarkan "Operation Peace Spring.". *Kompas*, [online]. Dalam:

<https://internasional.kompas.com/read/2019/10/10/08070381/turki-mulai-lancarkan-operation-peace-spring-perang-lawan-kurdi-di?page=all> [Diakses 12 Maret 2026]

Siahaan, B. F. (2019). *Intervensi Militer Turki Dalam Mengatasi Kelompok Militan Suku Kurdi (Pkk/Pyd) Terkait Konflik Suriah Periode 2016-2018*. Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. <https://repository.upnvj.ac.id/625/1/Awal.pdf> [Diakses 5 Maret 2026]

Soner, B. A., Aslan, Ö., & Kiyici, H. (2017). *PKK's regional franchise of terror*. International Center for Terrorism and Security Studies. [online]. Dalam: <https://cdn2.pa.edu.tr/Upload/Rapor/Dosya/pkke28099s-regional-franchise-of-terror-01-mayis-2017.pdf> [Diakses 3 Maret 2026]

Yeşiltaş, M., Seren, M., & Özçelik, N. (2017). *Operation Euphrates Shield. Implementation and lessons learned*. SETA. [online] Dalam: <https://media.setav.org/en/file/2017/11/operation-euphrates-shield-implementation-and-lessons-learned.pdf> [Diakses 3 Maret 2026]